

**DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN
DESA KE NAGARI
(Studi di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh

YETTI

TM/NIM: 95937/2009

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Suarasan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

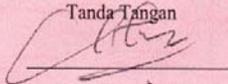
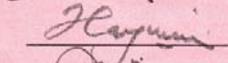
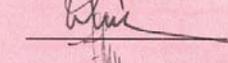
Pada hari Selasa 23 Juli 2013 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA KE NAGARI
(STUDI DI NAGARI RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

Nama : YETTI
TM/NIM : 2009/95937
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2013

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Yasril Yunus, M.Si.	
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.	
Anggota	: Dra. Hj. Jumiati, M.Si.	
Anggota	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd.	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M. Hum.	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

ABSTRAK

**Dampak Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Ke Nagari (Studi di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat).
Oleh: Yetti, 2009 – 95937.**

Penelitian ini mengamati tentang dampak perubahan sistem Pemerintahan Desa ke Nagari yang terjadi di Kenagarian Rabi Jonggor. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak Positif dan Negatif terhadap perubahan Desa ke Nagari, dan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan sistem Pemerintahan tersebut yang diteliti di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, menemukan fakta-fakta atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian adalah Wali Nagari, sekretaris Wali Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung dan masyarakat yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya permasalahan dalam perubahan Desa ke Nagari. Permasalahannya yaitudilihat dari segi Positifnya meningkatnya perekonomian serta rasa persatuan dan kesatuan semakin timbul pada jiwa individu masing-masing, dan pendidikan juga sudah jauh meningkat namun, serta organisasi juga cukup meningkat setelah menjadi Pemerintahan Nagari ini contohnya Pkk sudah sering mengadakan perlombaan antar jorong-jorong, dan timbulnya kembali budaya-budaya yang dulu sudah mulai pudar, seperti budaya tari tor-tor sudah dilestarikan kembali dan gerdang sembilanpun mulai dipakai lagi pada saat acara pernikahan, sedangkan dilihat Negatifserinya timbul perbedaan pendapat antara Ninik Mamak dengan Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor ini dan kalau dari adat iya itu apa bila ada orang yang pindah kenagari kita ini sendiri harus melapor kepada adat tetapi ini tidak ada yang melaporkanya kepada adat tetapi ini hanya melaporkanya hanya sampai dikantor wali Nagari.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Ke Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**, tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs.Yasril Yunus, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Drs.Hj. Jumiati, M.Si. Bapak Dr.H. Helmi Hasan, M.Pd. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum. selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.

3. Ketua Jurusan ISP Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Sekretaris Jurusan Henni Muchtar, S. H.M.Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Penasehat Akademis penulis Bapak Dra. H. Helmi Hasan, M.Pd. yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
5. Dekan besar staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasama Barat.
6. Wali Nagari Rabi Jonggor, tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Nagari Rabi Jonggor yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada orang Tua (umakku IdaWati) dan abangku (Henra) serta kakak iparku (desi) yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan tak lupa kepada etekku (maresni) yang selalu member semangat kepada saya dan abangku (iton) yang selalu mengingatkanku di saat akulupa
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan talupa juga kepada teman ku yang teristimewa Tama Lubis yang selalu memberiku motivasi, kepada (Dj) terimakasih atas bantuanya selama ini, bersahabatan kita tak kan pernah aku lupakan selamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait.

Padang, Juni 2013

YETTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi, Batasan, Rumusan.....	5
C. TujuanPenelitian	6
D. ManfaatPenelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. KajianTeoritis.....	8
B. KerangkaKonseptual	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. JenisPenelitian.....	32
B. LokasiPenelitian.....	32
C. InformanPenelitian.....	33
D. JenisdanSumber Data.....	33
E. UjiKeabsahan Data.....	35
F. TeknikAnalisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TemuanUmum	38
B. Temuankhusus	45
C. Pembahasan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Tata GunaLahan.....	39
2...Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Jorong.....	41
3. Tabel 4. 3Jumlah Penduduk berdasarkan usia.....	42
4. Table 4. 4 Fasilitas Sekolah Di Nagari Rabi Jonggor.....	43
5. Tabel 4. 5 Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	.44
6...Tabel 4. 6 Jumlah Fasilitas Peribadatan.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. SuratIzin Penelitian dari Dekan FIS
3. SuratIzin Penelitian dari kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
4. SuratIzin Penelitian dari Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan di seluruh wilayah Sumatera Barat adalah sistem pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa. Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Disini Kepala Desa adalah “penguasa” LMD itu sendiri. Sehingga praktis tidak ada kekuatan yang mampu berperan sebagai penyeimbang Kepala Desa. Dengan ketentuan demikian maka tidak ada kontrol sosial dari bawah, bahkan dari samping sekalipun, yang ada hanyalah kontrol dari atas.

Setelah jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberipeluang untuk daerah juga mengurus dan menata kembali pemerintahan terendah di daerah berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing Provinsi Sumatra Barat memilih untuk kembali ke pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terendah. Perubahan ini bertujuan untuk mendekatkan Negaradengan rakyat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan, kesejahteraan, keadilan serta memberi kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk ambil bagian dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, terbuka, partisipatif, serta aspiratif.

Respon Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang ini adalah dengan mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 yaitu Tentang Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat diatur dengan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Nagari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat memiliki lembaga-lembagasepeti Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), yang merupakan lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari yang (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, daerah ini dulu berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat berdiri pada tanggal 19 Januari Tahun 2004 dan Pada Tahun 2003 Tanggal 18 Desember mulailah dipisah pasaman tersebut menjadi kabupaten Psaman Timur dan Pasaman Barat, dimana Pasaman Barat ini yang berdiri sendiri dengan Ibu Kota Simpang Empat.

Jadi semenjak berdirinya Pasaman Barat sudah memiliki Nagari sebagai Pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Sekarang jumlah Nagari di Pasaman Barat sebanyak 19 Nagari, salah satunya adalah Nagari Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor merupakan penggabungan dari 16 Desa yaitu Desa Sitobu, Rabi Jonggor, Bandar, Paraman Ampalu, Ranto Panjang, Aia Dingin, Simpang Tigo Alin, Tanjung Durian, Serasah Kenaikan, Talang Kuning, Kampuang Guo dan Siligawan Gadang. Semenjak menjadi Nagari, banyak terjadi perubahan yang terlihat, seperti kegiatan organisasi di dalam Nagari Rabi Jonggor memiliki banyak kemajuan dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi PKK, wirid yazin, tempat belajar mengaji untuk anak-anak, kelompok tani dan sebagainya. Keberhasilan yang dicapai suatu Nagari tidak lepas dari usaha Pemerintah Nagari dalam menata dan mengayomi masyarakatnya serta harus dibarengi dengan dukungan masyarakat agar terciptanya hubungan yang sinergi demi tercapainya tujuan bersama (wawancara, 27 Desember 2012 Minsar Lubis selaku Wali Nagari).

Disamping kemajuan itu ternyata masih terdapat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam suatu Nagari. Seperti selisih paham yang terjadi antara Ninik Mamak dan pihak pemerintahan Nagari. Badan musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI), yang merupakan lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari yang (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak tidak berfungsi sesuai dengan haknya. Pada lembaga ini seharusnya aspirasi Ninik Mamak dan masyarakat ikut dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan Nagari tetapi dalam prakteknya pendapat pihak Wali Nagari lah yang

benar, sementara pendapat para pemangku adat atau masyarakat tidak diterima, jadi pemerintahan disini masih seperti pemerintahan Desa yaitu Wali Nagari adalah penguasa. Konflik yang terjadi disini seperti penetapan anggaran Nagari, pihak Ninik Mamak ingin memasukkan TPA (Tempat pendidikan agama) bagi anak-anak dan kegiatan seni tradisional adat mandahiling ke dalam anggaran Nagari, karena menurut mereka pemerintahan Nagari harus kental dengan unsur-unsur adat atau tradisi nenek moyang tidak seperti ketika pemerintahan Desa, tetapi pihak Nagari menyanggahnya. Dengan kondisi ini setiap ada musyawarah Nagari, pihak masyarakat dan Ninik Mamak sedikit yang hadir. Disini terlihat ketidak akuran masyarakat dengan pihak pemerintah. Hal ini berdampak negatif terhadap pembangunan Nagari, Nagari tidak akan bisa berkembang atau bahkan maju jika di dalamnya masih terdapat suasana yang tidak nyaman.

Tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem Pemerintahan terendah diseluruh Indonesia, Pemerintahan yang dulunya Nagari berubah menjadi pemerintahan Desa. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang itu, mulai tanggal 1 Agustus 1983, Seluruh Nagari-Nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan Desa (Sutan, 2000).

Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Perbedaan sistem Pemerintahan Nagari dengan sistem Pemerintahan Desa yang kedua yaitu dalam segi pelaksanaan dan kedudukan dalam pemerintahan.

Dari latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui dampak perubahan Desa ke Nagari terhadap pemerintahan di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat Nagari Rabi Jonggor.
2. Masih sering terdapat perselisihan pendapat Ninik Mamak dengan Pemerintahan Nagari tersebut.
3. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan aparatur Nagari terhadap masyarakat.
4. Kurang berfungsinya anggota KAN dipemerintahan Nagari untuk mengambil keputusan apa bila ada permasalahan di Pemerintahan Nagari ini.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti membatasi masalah ini yaitu pada Dampak Perubahan Desa Ke Nagari Terhadap Pemerintahan di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja dampak positif perubahan Desa ke Nagari terhadap Pemerintahan di Nagari Rabi Jonggor dilihat dari faktor yuridis, budaya, historis di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja dampak Negatif perubahan Desa ke Nagari terhadap Pemerintahan dilihat dari faktor yuridis, budaya, historis di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak positif perubahan Desa ke Nagari terhadap Pemerintahan di Nagari Rabi Jonggor yang dilihat dari yuridis, budaya, historis di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dampak negatif perubahan Desa ke Nagari terhadap Pemerintahan di Nagari Rabi Jonggor yang dilihat dari yuridis, budaya, historis di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Sebagai masukan dan sumbang pimikiran terhadap penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan di bidang ilmu sistem pemerintahan Desa terutama yang berkaitan dengan masalah dampak perubahan sistem pemerintahan Desa ke Nagari.
2. Secara praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Nagari Rabi Jonggor dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari.